

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG MAJELIS TAKLIM  
(Studi pada Majlis Taklim di Kecamatan Pugung  
Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**HERNIYATI  
NPM 1721020199**

**Prodi: Hukum Tatanegara ( Siyasaah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/ 2021 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG MAJELIS TAKLIM  
(Studi pada Majelis Taklim di Kecamatan Pugung  
Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**HERNIYATI  
NPM 1721020199**

**Prodi : Hukum Tata Negara ( Siyasah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**Pembimbing II : Dr. H. Yusika Sumanto, LC., M.Ed**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/ 2021 M**

## ABSTRAK

Majelis taklim adalah sebuah lembaga atau kelompok masyarakat yang mengadakan pendidikan keagamaan islam yang bersifat nonformal yang Keberadaannya di masa moderen sekarang ini menjadi solusi bagi dunia pendidikan khususnya pendidikan islam. Tidak sedikitnya majelis taklim yang ada di setiap wilayah maka perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur dan mengontrol keberadaan majelis taklim.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan menteri agama republik indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim pada majelis taklim di kecamatan Pugung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan iperaturan menteri agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang majelis pada majelis taklim di kecamatan Pugung

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskripsi dan analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa data yang didapat dari hasil penelitian kemudian peneliti memaparkan data-data tersebut dan memperoleh kesimpulan. Penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan (*field research*) atau kepada responden.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan peraturan menteri agama republik indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim pada majelis taklim di kecamatan Pugung sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan masih dijumpainya majelis taklim yang belum menerapkan Peraturan dan pemerintah yang belum maksimal dalam melakukan pemerataan terhadap penerapan peraturan serta belum maksimal nya memberikan solusi terhadap keterbatasan yang ada dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Republik Indoneia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang majelis taklim dan Pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Menteri Agama Republik Indoneia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim Pada Majelis Taklim Di kecamatan Pugung yaitu majelis taklim belum amanah dalam menjalankan peraturan. patuhnya rakyat kepada pemimpin adalah hal perlu untuk dilakukan sebagai wujud kerja sama yang baik guna mencapai tujuan baik di dunia maupun di akhirat. seperti yang telah Allah Ta'ala terangkan dalam Q.S An-Nisa ayat 59 "*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rosul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan diantara kamu)*".





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herniyati  
NIM : 1721020199  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 10 Juni 2021

Penulis



Herniyati  
1721020199





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi Pada Majlis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**  
**Nama** : **Herniyati**  
**NPM** : **1721020199**  
**Jurusan** : **Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)**  
**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosayahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP 196210221993031002**

**Dr. H. Yusika Sumanto, LC., M.Ed**  
**NIP**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)” disusun oleh, Herniyati, NPM : 1721020199, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Sar’iyah), Telah diujikan dalam siang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Frenki, M.Si**

**Sekertaris : Erik Rahman Gumiri, M.H**

**Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos. I**

**Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**Penguji III : Dr. H. Yusika Sumanto, LC., M.Ed**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP.196210221993031002**



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. Annisa: 58) <sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h.115





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dan dengan penuh rasa bangga skripsi ini aku persembahkan sebagai tanda bukti cinta kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Madroki dan Ibu Rukmanah yang selalu mencurahkan kasih sayang dan keikhlasan doa dalam setiap perjuangan, memberikan bimbingan dan dukungan serta memotifasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan harapan dan dapat menjadi seseorang yang berguna bagi sesama.
2. Prof. Dr. H. Moh Mukri, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bapak Frenki, M.Si dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI selaku kepala jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
4. Kiyai Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur Noor, S.Ag., M.Si selaku pimpinan Pondok Pesantren Annoor yang senantiasa membimbing penulis.
5. Adik tercinta Ikhwanudin, Nenek dan kakek yang telah memberikan dukungan dan motifasi kepada penulis
6. Sahabat sekaligus *Patner* berjuang kamar A3 Eka Fitri Astuti, Melinia Agustin, Asri Musfiroh, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi. Al fina Fauziah, Nuri Fitriani, Mauidhotun Hasanah, Fauzi Setiono dan Reki Riyandi yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi, dan teman-teman seperjuangan HTN D yang sudah memberikan kesan disetiap perjalanan penulis dalam menempuh perkuliahan serta seluruh santri dan santriwati pondok pesantren Annor yang telah memberikan kesan indah setiap harinya kepada penulis.

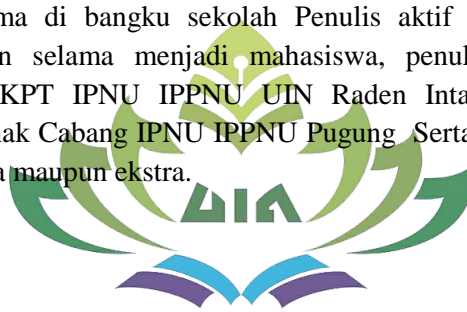


## **RIWAYAT HIDUP**

Herniyati, dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 07 Februari 1999, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Madroki dan Ibu Rukmanah.

Riwayat pendidikan Penulis dimulai dari Madrasah Ibtida'iyah Nurul Falah Gunung Tiga Pugung, selesai pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Gunung Tiga Pugung selesai pada tahun 2014 kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jurusan yang ditekuni adalah Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ) dan selesai tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah dengan Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama di bangku sekolah Penulis aktif dalam organisasi Pramuka dan selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi PKPT IPNU IPPNU UIN Raden Intan Lampung dan Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Pugung Serta aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra.







## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Ta'ala. Yang telah memberikan segala karunia dan nikmatnya, kesehatan rohani maupun jasmani. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”** Sebagai syarat akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Lampung.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku pembimbing 1 yang telah membimbing penulis dan telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
4. Bapak Dr. H. Yusika Sumanto, LC.,M.E.d selaku pembimbing 2 yang telah membimbing dan telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
5. Bapak Frenki, M.Si dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI selaku kepala jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara
6. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan
7. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis menyerahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat dipetik manfaatnya sehingga dapat bermanfaat dan dapat menjadi

sumbangan yang cukup berarti dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Bandar Lampung, 10 Juni 2021  
Penulis

Herniyati



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	11
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Fiqih Siyasah .....	19
1. Pengertian Fiqih Siyasah .....	19
2. Objek Kajian Fiqih Siyasah .....	22
3. Tujuan Fiqih Siyasah .....	27
B. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim .....	41
C. Pengertian Majelis Taklim .....	45



**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK DAN DESKRIPSI  
DATA PENELITIAN**

A. Kecamatan Pugung .....	51
1. Sejarah Singkat Kecamatan Pugung .....	51
2. Keadaan Geografis Kecamatan Pugung .....	52
3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Pugung .....	56
B. Penerapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim Pada Majelis Taklim Dikecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus .....	58

**BAB IV ANALISIS**

A. Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus .....	67
B. Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Ditinjau Dari Fiqih Siyasah .....	69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. Lampiran 1	Surat Balasan izin Penelitian
2. Lampiran 2	Surat dinas Penanaman modal
3. Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Penelitian
4. Lampiran 4	Struktur Kecamatan Pugung
5. Lampiran 5	Pedoman wawancara
6. Lampiran 6	Surat Keterangan wawancara
7. Lampiran 7	Dokumentasi
8. Lampiran 8	Contoh Struktur Kepengurusan Majelis Taklim
9. Lampiran 9	Turnitin

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data sektor pertanian tahun 2013 di kecamatan Pugung .....	65
1.2 sektor perkebunan tahun 2013 di Kecamatan Pugung .....	66
1.3 Penerapan peraturan Menteri Agama republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim pada majelis taklim di kecamatan pugung .....	76





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1	Surat Balasan izin Penelitian
2. Lampiran 2	Surat dinas Penanaman modal
3. Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Penelitian
4. Lampiran 4	Struktur Kecamatan Pugung
5. Lampiran 5	Data Majelis Taklim Kecamatan Pugung
6. Lampiran 6	Pedoman wawancara
7. Lampiran 7	Surat Keterangan wawancara
8. Lampiran 8	Dokumentasi
9. Lampiran 9	Contoh Struktur Kepengurusan Majelis Taklim
10. Lampiran 10	Turnitin







## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”**, berikut ini adalah penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal skripsi ini.

**Tinjauan Fiqih Siyasah** adalah suatu kegiatan untuk meneliti, dan mengkaji gejala-gejala maupun aspek ketatanegaraan berdasarkan sudut pandang salah satu aspek Hukum Islam yang berhubungan<sup>1</sup> dengan ketata negara islam

**Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim** adalah suatu penerapan atau pelaksanaan berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat, kelompok-kelompok pemerintah ataupun masyarakat terhadap program, aturan maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal sebagai sarana dakwah islam.

**Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus** adalah kecamatan yang memiliki 27 pekon dan berada di kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah kajian atau penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada media Group, 2014), 4.

Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim Pada Majelis Taklim di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang ditinjau dari fiqih siyasah.

## B. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu proses mengubah sikap dan perilaku seseorang, kelompok orang atau peserta didik melalui pengajaran atau latihan, proses, perbuatan dan cara-cara yang sifatnya mendidik. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi di masa mendatang.<sup>2</sup> Pendidikan memiliki pengaruh besar bagi kehidupan setiap individu, menjadikan seseorang memiliki kualitas diri sehingga mampu mengatasi kesulitan yang di hadapi. Selain itu dengan adanya pendidikan maka dapat mendorong perubahan-perubahan dan perkembangan manusia sehingga menjadi lebih baik.

John S. Brubacher mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses timbal balik dari tiap individu sebagai penyesuaian diri dari seseorang terhadap alam semesta dan temannya. Menurut John S. Brubacher pendidikan adalah pendidikan yang terorganisir, sehingga potensi manusia, moral, intelektual maupun jasmaninya untuk pribadi itu sendiri dan mampu bermanfaat bagi dirinya.<sup>3</sup>

Perihal pendidikan, terdapat tiga jalur pendidikan yaitu :

- a. Melalui pendidikan formal; pendidikan formal adalah salah satu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan atas.

---

<sup>2</sup> A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), 77

<sup>3</sup>Buhori Muslim, "Analisis terhadap pemikiran John Dewey menurut Perspektif pendidikan Nasional". *Jurnal SOSIO-RELIGIA*, Vol. 8 no. 4 (Agustus 2009): 2.

- b. Melalui pendidikan nonformal ; adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang merdeka dan berdaulat, yang hanya memiliki satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang kekuasaannya dipegang oleh presiden. Dalam hal ini pemerintah pusat memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan pemerintahan, dan melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah, di dalam maupun di luar negeri.<sup>5</sup> Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintahan pusat (presiden) di bantu oleh wakil presiden, para menteri atau kabinet maupun parlemen.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak melakukan pemisahan antara pendidikan dengan politik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya upaya politisasi terhadap pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu dengan adanya Departemen Pendidikan,<sup>6</sup> adanya pengaturan terhadap keberadaan pendidikan yaitu dengan dimasukkannya dalam amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 31, ayat 1 dan 2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa “Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan

---

<sup>4</sup>Depdiknas RI. *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta : Depdiknas, 2003), 33

<sup>5</sup>Khairuddin, Iwan satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 45

<sup>6</sup> Zaini Dahlan, “Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta’lim, Jurnal Pendidikan dan Keislaman”. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. I. No. 1 (Januari-Juni 2018): 124-125

sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”<sup>7</sup>

Sementara dalam aspek pendidikan Islam, pemerintah Republik Indonesia, melalui Departemen Agama mengatur segala kepentingan pendidikan Islam agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap dunia pendidikan Islam, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Keberadaan pendidikan Islam di tengah masyarakat memberikan warna tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, seperti adanya majelis ta’lim, pesantren ataupun madrasah, warna-warna tersebut tentu saja berasal dari nilai-nilai yang islami.

Majelis taklim adalah penyelenggara pendidikan keagamaan Islam yang bersifat non formal. Menurut Prof. Dr Omar Muhammad At-Tamr Asy-Syaibany pendidikan Islam adalah sebuah proses mengubah tingkah laku dari seseorang dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitar, melalui cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi yang ada dimasyarakat.<sup>8</sup> Majelis taklim merupakan salah satu sarana dakwah islam yang diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan bisanya diikuti oleh jamaah yang *relative* banyak.<sup>9</sup> Pada dasarnya Majelis taklim bertugas untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan umat muslim terhadap ajaran agama Islam. Tujuan adanya

---

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1)

<sup>8</sup> Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), 27

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim, Pasal 1 ayat (1)

majelis taklim adalah untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah Ta'ala, antara manusia dengan sesamanya, serta antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah Ta'ala.

Keberadaan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal, telah diakui keberadaannya yaitu dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.<sup>10</sup> Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah maupun pelengkap pendidikan disamping pendidikan yang bersifat formal. Dalam Pasal 26 ayat 4 telah dijelaskan jika satuan pendidikan nonformal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan lainnya.

Majelis taklim merupakan sistem pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia, bahkan dalam dunia Islam. Meskipun pada saat itu belum dikenal istilah Majelis Taklim. Berkenaan dengan hal itu sebuah hadis menyatakan:

"عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ , حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ , وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَجْدَيْهِ , وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ , وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ , وَتَصُومَ رَمَضَانَ , وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا..." (رواه مسلم)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi majelis ta'lim peran aktif majelis taklim meningkatkan mutu pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 20013), 86

<sup>11</sup> Imam Nawawi, *Hadits Arba'in An Nawawi*, terjemahan Muhil Dhofir (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2001), 7



*“ Dari sahabat Umar Radhiyallaahu anha, katanya : pada suatu hari, tatkala kami sedang duduk bersama Rosulllah SAW. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang putih bersih dan memiliki rambut yang hitam warnanya. Tak tampak sedikit pun bahwa ia baru melakukan perjalanan jauh, sedangkan kami tak seorang pun mengenalnya. Kemudian orang itu duduk di hadapan Roslllah SAW. Sambil menyandarkan lutut nya pada lutut nabi dan meletakan tangannya pada paha nabi SAW. Seraya berkata : “Wahai muhammad, jelaskan kepada ku tentang islam ! Rosullah SAW. Menjawab : Islam adalah bahwa engkau bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, dan mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan pergi haji ke baitullah apabila engkau telah mampu melakukannya”.....(HR. Muslim)<sup>12</sup>*

Hadis di atas menunjukan bahwa pada zaman Rasulloh Shallallahu ‘alaihi Wasallama. Adanya Sebuah perkumpulan antara Rasulloh Shallallahu ‘alaihi Wasallama bersama para sahabat, yang secara tidak langsung dijadikan oleh Rasulloh Shallallahu ‘alaihi Wasallama sebagai sarana dakwah yang cukup efektif dalam menyebarkan ajaran islam sehingga keberadaan Majelis Taklim yang ada saat ini tidak dapat terlepas dengan unsur-unsur dakwah Islam yang sudah dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallama.

Aturan terhadap Majelis Taklim ini sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan 2, yaitu: “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

---

<sup>12</sup>Ibid., 9

(ayat 1). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya (ayat 2)”<sup>13</sup>

Aturan-aturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2019 merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap majlis taklim yang telah berdiri. Dalam pasal (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 dijelaskan “jika perseorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan lembaga pendidikan, masjid, dan mushala dapat mendirikan Majelis Taklim.” Namun dalam mendirikan Majelis Taklim tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal (6) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud tersebut yaitu :

1. Majelis Taklim yang dimaksud dalam pasal 5 harus terdaftar pada kantor kementerian agama
2. Pendaftaran majelis taklim sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh pengurus kantor kepada kepala kantor kementerian agama atau melalui Kantor Uraan Agama (KUA) kecamatan
3. Pendaftaran majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki kepengurusan
  - b. Memiliki domisili
  - c. Memiliki paling sedikit lima belas orang jama'ah
4. Permohonan yang dimaksud dalam ayat (3) diajukan dengan melampirkan

---

<sup>13</sup> Depdiknas RI. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) E

- a. Foto copy kartu tanda penduduk pengurus
- b. Struktur pengurus
- c. Surat keterangan domosili majelis taklim dari desa/ kelurahan
- d. Foto copy kartu tanda penduduk jama'ah<sup>14</sup>

Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pasal 6 tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap majelis taklim, hal ini di perlukan untuk mempermudah Kementerian Agama dalam mendata dan memberikan bantuan disetiap penyelenggaraan kegiatan yang diadakan oleh majelis taklim yang terkait. Majelis taklim yang tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 tersebut, maka dikhawatirkan Kementerian Agama tidak dapat memberikan bantuan dana kepada majelis taklim ketika suatu majelis taklim hendak menyelenggarakan suatu kegiatan karena tidak terdata di Kementerian Agama.

Dalam membentuk kebijakan sangatlah penting untuk memperhatikan kemaslahatan umat. Setiap kebijakan yang yang dikeluarkan harus berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada allah, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas. Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S Al A'rof ayat 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

*“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka*

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim, Pasal 6 Ayat 1-5

*mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S Al-A'raf/9 : 96 )*

Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk negeri, tetapi jika penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah di berikan Allah Ta'ala dapat kita dapatkan.

Jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, maka ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pasal 6 peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim tersebut, terdapat aspek pengaturan di dalamnya.<sup>15</sup> Pada dasarnya peraturan tersebut dibuat untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia atau umat yaitu melakukan pemerataan bantuan sehingga majelis taklim yang ada dapat di berikan bantuan dalam hal pendanaan, pembinaan sehingga dapat menjalankan setiap kegiatan secara maksimal.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim pada majelis taklim di kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus, Sehingga penulis dapat mengetahui penerapan dari peraturan Menteri Agama Republik Indonesia di kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus dan bagaimana Tinjauan fiqh siyasah terhadap fenomena Implementasi peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

---

<sup>15</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim pada majelis taklim di kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam proposal skripsi ini adalah tentang Implementasi Dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Pada Majelis Taklim di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Dan subfokus dari penelitian ini adalah tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim terhadap Majelis Taklim di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majlis Taklim Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui implementasi dari peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang

Majelis Taklim Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

- b. Untuk mengetahui tinjauan dari fiqih siyasah terhadap implementasi peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim Taklim Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

## **F. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim
- b. Secara praktis, Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang penulis lakukan.

1. Hasil penelitian dari Umar Alfaruq tentang politik dan kebijakan tentang majelis taklim di indonesia ( analisis kebijakan peraturan menteri agama no. 29 tahun 2019. Adapun hasil dari penelitian dari Umar Alfaruq adalah bahwasanya dikeluarkannya kebijakan berupa Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim adalah sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama guna menanggulangi radikalisme di indonesia, dan sebagai regulasi dalam mengatur majelis taklim. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun

2019 Tentang Majelis Taklim. Adapun Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Umar Alfaruq dengan yang dilakukan oleh penulis adalah dari segi pendekatan; Umar Alfaruq menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang sumber data primer maupun sekundernya didapatkan dari studi pustaka, (*library research*), dan teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik analisa wacana (*disource analysis*). Sedangkan penelitian yaang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian yang *field research* (penelitian lapangan) yang sumber datannya dari hasil *interview* dan observasi (data primer) dan buku, jurnal, peraturan-peraturan yang menunjang terhadap objek penelitian, dan lain-lain (data sekunder)

2. Hasil penelitian dari Leni Perdani Usman tentang majelis taklim sebagai sarana internaliasi dakwah pada masyarakat kedaton raman I. Menjelaskan bahwa internalisasi atau menyatukan nilai-nilai yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah penting. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Leni Perdani Usman dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai Majelis Taklim, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan sumber data yang digunakan. Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penelitian Leni Perdani Usman lebih menekankan kepada sarana internaliasi dakwah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Iplementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitia yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yang (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan



atau pada responden dengan sistematis dan mengangkat fakta-fakta yang ada di lapangan. Khususnya di kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Dalam penelitian ini di khususkan tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan atau pelaksanaan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptis analitis, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa data yang didapat dari hasil penelitian kemudian memaparkan data-data tersebut dan memperoleh kesimpulan

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibagi mejadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari hasil *interview* dan observasi.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) terhadap objek penelitian seperti kondisi, situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Selain itu penulis juga memperoleh data primer dari penelitian dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan objek yang menjadi fokus penelitian dari peneliti. Jumlah pihak yang diwawancarai yaitu berjumlah 25 orang, dengan

---

<sup>16</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 250.

rincian 2 orang penyuluh agama islam, 1 camat, 1 orang ketua forum majelis taklim dan 21 ketua majelis taklim.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan kemudian di kumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang bersumber dari studi pustaka yang berasal dari buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Data sekunder juga di gunakan sebagai pendukung data primer.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas atau keseluruhan dari objek penelitian<sup>17</sup> yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap dengan objek yang diteliti berupa orang, lembaga, perusahaan, media dan sebagainya.<sup>18</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah majelis taklim yang ada di kecamatan Pugung. Kecamatan Pugung adalah kecamatan yang terdiri dari dua puluh tujuh Pekon dan disetiap pekon terdapat dua dan bahkan lebih majelis taklim. Sehingga di kecamatan Pugung Terdapat dua ratus lima belas Majelis Taklim

---

<sup>17</sup> M.Burhan Mungin, Rahma Ida, *Tehnik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif* ( Jakarta : Pranadamedia Grup, 2020), 313

<sup>18</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* ( Bandar Lampung; Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 8.

## b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. penelitian ini menggunakan Teknik Pengambilan *purposive sampling* <sup>19</sup> yaitu dengan menentukan atau memilih Majelis Taklim sebagai objek penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dari penelitian ini adalah dua puluh satu majelis taklim yang berada di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap kondisi dan situasi yang ada di lokasi objek penelitian. Dalam pengertian lain yang dimaksud dengan observasi adalah “studi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. Sedangkan Karl Weick, mendefinisikan observasi sebagai “penelitian, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme tertentu, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris”.<sup>20</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa percakapan antara dua orang dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, setelah itu jawaban yang

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2019), 289

<sup>20</sup> Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 83

diperoleh di catat dan di rekam.<sup>21</sup> Metode ini merupakan metode utama yang digunakan penulis dalam meneliti objek penelitian. Metode wawancara ini di rasa sangat efektif di samping tehnik pengumpulan data secara observasi, karena dengan melakukan wawancara maka penulis dapat memperoleh data dan informasi secara langsung dan akurat dari responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip maupun buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum dan lain-lain, yang memiliki keterkaitan atau yang berhubungan dengan penelitian.<sup>22</sup>

Metode dokumentasi juga digunakan sebagai penunjang dalam penelitian khususnya dalam teknik pengumpulan data. Dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi peneliti dapat menggambarkan latar belakang mengenai pokok masalah penelitian juga dapat dijadikan bahan pengecekan terhadap kesesuaian data.

6. Metode pengolahan data

Pengolahan data dalah suatu proses yang digunakan dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Berikut adalah metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian :

- a. Editing; adalah pengecekan atau pengoreksian terhadap data yang sudah terkumpul, karena kemungkinan data yang masuk tersebut tidak logis dan meragukan.

---

<sup>21</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, 107.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 112

- b. Rekontruksi data (*reconstructing*); yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan.
- c. Penyusunan atau Sistematis data (*contructing* atau *systematizing*); yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>23</sup>

## 7. Analisa Data

Menurut Lexy J. Maleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang. Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data dan pemahaman hasil analisis.<sup>25</sup> Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara, dan metode dokumentasi.

Selain itu penulis menggunakan metode Deduktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis juga menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum,<sup>26</sup> lalu penulis mengadakan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.

---

<sup>23</sup>Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

<sup>24</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, 128.

<sup>25</sup> Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 127.

<sup>26</sup>Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 30.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga pembaca dapat memahami skripsi ini dengan mudah, adapun sistematika tersebut terbagi kedalam beberapa bab, yaitu :

1. Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi, dan sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
2. Bab kedua, Landasan Teori, meliputi: Tinjauan fiqh siyasah, pengertian fiqh siyasah, objek kajian fiqh siyasah, tujuan fiqh siyasah, peraturan Menteri Agama republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim, dan pengertian majelis taklim.
3. Bab ketiga, Deskripsi Objek Penelitian. Meliputi: gambaran lokasi penelitian seperti gambaran objek umum objek penelitian, dan penyajian fakta dan data yang ada dilapangan mengenai Penerapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Majelis Taklim.
4. Bab keempat, Analisis penelitian, meliputi implementasi peraturan menteri agama republik indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim di kecamatan Pugung, serta tinjauan fiqh siyasah mengenai implementasi peraturan Menteri Agama republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim di kecamatan Pugung.
5. Bab kelima Penutup, meliputi: kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Fiqih Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqih Siyasah

Secara bahasa kata “fiqh” berasal dari kata (الْفَقْهُ) yang memiliki arti “faham”<sup>1</sup> atau “paham yang mendalam”. Adapun pengertian secara terminologi “suatu ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang sifatnya amaliyah yang bersumber dan digali dari dalil-dalil yang tafsili”.<sup>2</sup> Atau dapat dikatakan “pemahaman dan pengetahuan secara menyeluruh tentang ajaran islam baik bersumber dari Al-Qur’an atau hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam”.

Secara lebih jelas kata fiqh dapat didefinisikan sebagai berikut :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَائِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

” Ilmu tentang hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh dari dalildalilnya yang terperinci.”<sup>3</sup>

Sedangkan secara definitif, fiqh berarti “Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar’i yang berhubungan dengan amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang tafsili”.<sup>4</sup> Maksud dari kata “Amaliyah” adalah fiqh hanya berkaitan dengan perbuatan manusia, berupa lahiriyahnya dan bukan hal-hal yang berkaitan dengan batiniah seperti akidah atau keimananya seseorang.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *أَلْفَاةُ الْعَفْهَةِ Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam* (Jakarta : Pustaka Al Furqan 2009), 1

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2014), 40

<sup>3</sup> Rahmat Safae’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 17

<sup>4</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqih*, 2.



Fiqih merupakan pemahaman *istidlal* / penggunaan dalil untuk dijadikan sebuah hukum terhadap suatu masalah yang belum ada pada masa sebelumnya.

Ilmu fiqih terdiri atas dua unsur yaitu unsur ajaran pokok dan unsur ajaran *furu'*. Oleh karena itu di dalam ilmu fiqih dapat menerima adanya perubahan yang sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>5</sup>

Siyasah berasal dari kata “sasa”. Secara etimologi kata siyasah memiliki arti: mengurus, mengatur, memimpin, memerintah, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.<sup>6</sup> Namun Secara harfiah Kata As-siyasah mengandung makna : pemerintahan, pengambilan keputusan membuat kebijakan, sebagai pengurus, pengawas, dan sebagainya.<sup>7</sup> Secara terminologi siyasah adalah mengatur dan memimpin sesuatu dengan mendatangkan kemaslahatan di dalamnya.<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “fiqih Siyasah” adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang tata negara islam, yang mengatur tata cara pelaksanaan kehidupan dalam bernegara, mengurus negara, membuat kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ketatanegaraan islam, sehingga terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudhorotan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Abdul Wahab Al-khalaf mendefinisikan Siyasah Sar'iyah sebagai “Pengurusan terhadap hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam, yang dilakukan dengan

---

<sup>5</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 24.

<sup>6</sup> *Ibid*, 25.

<sup>7</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqih*, 26.

<sup>8</sup> Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* , 25.

menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan terhadap kemudorotan dengan tidak melanggar batas-batas syari'ah yang *kully*, meskipun ditemukan adanya ketidak sesuaian dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.”<sup>9</sup>

Secara lebih luas Ibn Abidin mendefinisikan siyasah sariyah sebagai “Kemaslahatan yang ditunjukan kepada manusia yang dilakukan dengan cara membimbingnya ke jalan keselamatan baik di dunia maun di akhirat, siyasah berasal dari nabi secara khusus dan umum baik zahir maupun batinnya, dari yang memegang kekuasaan serta dari para ulama, ahli waris para nabi secara khusus pada batinnya”

Dari definisi-definisi yang dikemukakan tersebut terdapat penegasan di dalamnya, bahwasanya wewenang yang digunakan untuk membentuk produk hukum, baik peraturan maupun kebijaksanaan guna mengatur kepentingan negara dan mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada pemegang kekuasaan itu sendiri yaitu pemerintah, *ulil amri* atau *walatul amr*.<sup>10</sup>

Dalam ilmu fiqh siyasah hasil temuan manusia dibidang hukum ditempatkan serta mempunyai kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Penetapan peraturan yang resmi oleh negara dan tidak bertenangan dengan ajaran agama maka wajib ditaati dengan sepenuh hati. Kewajiban ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59

---

<sup>9</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqih*, 28

<sup>10</sup> Pulungan, *Fiqh siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

” Wahai orang-orang yang beriman ! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>11</sup>

## 2. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Objek kajian Fiqih Siyasah terdiri dari aspek pengaturan dan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang berupa interen suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksteren antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>12</sup>

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy objek kajian siyasah “Pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus

<sup>11</sup> Muzar Ibn Syarif, Khamami zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga 2008), 13.

<sup>12</sup> Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 29.

dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'amah yang tetap''<sup>13</sup>

Sedangkan Abdrahman Taj, mendefinisikan objek studi fiqh siyasah sebagai seluruh perbuatan seorang mukhalaf dan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan terhadap masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, walaupun hal yang diatur tersebut tidak pernah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis.<sup>14</sup>

Dalam tahap perkembangannya, ada beberapa pembidangan terhadap fiqh siyasah, namun dalam hal pembidangan ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan pakar fiqh. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan, ada tiga bidang kajian fiqh siyasah yaitu :

1. Siyasah Dusturiyah
2. Siyasah Maliyah
3. Siyasah Khariyyah

Berbeda dengan Abdul Wahab Khalaf, Al-mawardi dalam kitabnya yang berjudul Al-ahkam al-shulthaniyat, menurutnya bidang-bidang fiqh siyasah meliputi:

1. Siyasat dusturiyat (siyasah perundang-undangan)
2. Siyasat maliyat (siyasah keuangan)
3. Siyasat qadhaiyat (siyasah peradilan)
4. Siyasat harbiyat (siyasah peperangan)
5. Siyasat idariyat ( siyasah administrasi)<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pulungan, *Fiqh siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 30.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 43.

Hasbi Ash Shiddieqy membagi fiqih siyasah menjadi delapan bidang diantaranya yaitu :

1. Siyasah Dusturiah Syar'iyyah (politik pembuat undang-undang)
2. Siyasah Tasri'iyyah Syar'iyyah (Politik hukum)
3. Siyasah Qada'iyyah (Politik Peradilan)
4. Siyasah Maliyah Syar'iyyah (Politik ekonomi dan moneter)
5. Siyasah Idariyah Syar'iyyah (Politik administrasi negara)
6. Siyasah Kharijjiyah Syar'iyyah/Siyasah Dawliyah (Politik hubungan internasional)
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah (Politik pelaksanaan perundang-ndangan)
8. Siyasah Harbiyah Syar'iyyah (Politik peperangan)<sup>16</sup>

Pembidangan fiqih siyasah tersebut telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan manusia dan bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Mengenai hal tersebut pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan:

1. *Fiqih siyasah dusturiyyah* yaitu mengatur hubngan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya dalam batas-batas administratif suatu negara.
2. *Fiqih siyasah dawliyyah* yaitu pengaturan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu denganwarga negara dan lembaga negara dari negara lain.

---

<sup>16</sup> Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30.

3. *Fiqih siyasah maliyah* yaitu mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.<sup>17</sup>

Kedudukan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, hal tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT. Dan dapat kita maknai dari klausa surat Fathir ayat 39

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ

الْكُفْرِينَ كُفْرُهُمْ ۚ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ

إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

"Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, barang siapa yang ingkar, maka atasnyalah kekafirannya; dan tiadalah kekafiran orang-orang kafir menghasilkan di sisi tuhan mereka melainkan kemurkaan, dan tiadalah kekafiran mereka menghasilkan bagi mereka melainkan kerugian" (Q.S. Fathir [22]:39)<sup>18</sup>

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala lah yang menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi dan secara tidak langsung mengisyaratkan adanya hubungan antara manusia dengan tuhan. Dan secara tidak langsung pula Allah ta'ala memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga kemaslahatan di muka bumi ini sehingga terciptanya kedamaian.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 31.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI., 353.

Berdirinya daulah islamiyah pertama di muka bumi adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam Berhijrah ke Madinah dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam sebagai kepala negara.<sup>19</sup>

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam sebagai kepala negara memimpin negara dengan penuh kebijaksanaan, salah satunya terlihat ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam tetap memberi ruang untuk kaum yahudi dengan agama yang dipeluknya dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan orang-orang Anshar. Persaudaraan tersebut kemudian sampai kepada masalah waris mewarisi harta kekayaan, masing-masing karena persaudaraan ini sampai kemudian dibhatakan dengan hukum mawaris.<sup>20</sup>

Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks di zaman sekarang.<sup>21</sup> Menurut istilah hukum moderen daulah atau negara di definisikan sebagai: “Sekumpulan orang yang teratur dengan menempati daerah tertentu, mempunyai kedaulatan, dan mempunyai identitas secara maknawi”. Sehingga dapat ditemui unsur-unsur negara, unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Adanya sekelompok manusia
2. Tunduk pada tata aturan tertentu
3. Menempati wilayah tertentu
4. Mempunyai kedaulatan
5. Punya ciri-ciri tertentu secara maknawi<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Karim Zaidan, *Hak dan kewajiban warga negara menurut syare’at islam* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta), 41.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 15

<sup>21</sup> Jilmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 9

<sup>22</sup> Zaidan, *Hak dan kewajiban warga negara menurut syare’at islam*, 15.



Setiap negara yang berdiri sudah pasti mempunyai aturan yang ditunjukkan kepada seluruh warga negara. Sejatinya aturan tersebut digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat terkontrol dan mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ibnu Taimiyah hakikat dari sebuah pemerintahan adalah memiliki kekuasaan yang memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin di lingkungan masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karna sebab keegoisan mereka sendiri. Karena pemerintah merupakan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, yang ada karena suatu proses perebutan yang alamiyah, kemudian memperoleh legitimasi melalui perjanjian yang ada untuk hidup bersama. Dengan demikian penguasa dapat menuntut kepatuhan dari rakyat yang dia pimpin.<sup>23</sup>

### 3. Tujuan Fiqih Siyasah

Siyasah sar'iyah merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk peraturan terhadap urusan umat dan hal-hal yang berkaitan dengan negara baik segala bentuk hukum, peraturan, maupun kebijaksanaan yang di pegang oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dan tidak bertentangan dasa-dasar ajaran dan syari'at untuk dapat merealisasikan kemaslahatan umat.

Untuk lebih jelasnya Fiqih Syasah dalam arti umum adalah suatu ilmu tata negara di dalam ilmu agama islam yang dikelompokan ke dalam pranata sosial.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Suharti, "Al-Siyasah A-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibn Taimiyah)". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 2 (Jul-Des 2015):35

<sup>24</sup> Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 28.

Antara fiqh dan siyasah sar'iyah terdapat hubungan diantara keduanya, baik fiqh maupun siyasah sar'iyah adalah hukum-hukum yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk menciptakan kemaslahatan. Dari sisi lain hubungan diantara keduanya adalah bahwa fiqh siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqh atau kelompok fiqh. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada perbuatannya. Fiqh ditetapkan oleh mujtahid sedangkan siyasah sar'iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.<sup>25</sup>

Adapun kajian *Fiqh Siyasah* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Dusturiah*. *Fiqh Siyasah Dusturiah* adalah suatu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat. *Fiqh Siyasah Dusturiah* membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan hasil dari terwujudnya kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>26</sup>

*Siyasah Dusturiah* sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perundang-undangan negara.<sup>27</sup> Fiqh Siyasah Dusturiah memiliki cangkupan bidang kehidupan yang sangat luas dan bahkan kompleks, namun secara umum disiplin ilmu ini mencakup beberapa hal yaitu:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
3. Persoalan *bai'at*
4. Persoalan *waliyul ahdi*

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 29.

<sup>26</sup> Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria*, .47

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 177

5. Persoalan perwakilan
6. Persoalan *ahl halli wal adqdi*
7. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya

Persoalan-persoalan yang telah disebutkan diatas dan persoalan yang berkaitan dengan Fiqih Siyasah Dusturiah pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu : *pertama*, dalil-dalil *Kully*, baik ayat-ayat dari Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidus syari'ah,<sup>28</sup> dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan mengalami perubahan walaupun adanya perubahan yang terjadi di masyarakat. *Kedua* aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi maupun kondisi, termasuk hasil dari ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.<sup>29</sup>

*Fiqih Dusturi* bersumber pada: *Pertama* bersumber pada Al-Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan dalil-dalil *Kully* dan semangat ajaran Al-Qur'an. Sumber yang *kedua* adalah hadis yaitu khususnya hadis yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam . Di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. *Ketiga* adalah kebijakan-kebijakan *khulafa Al-Rasyidin* dalam mengendalikan pemerintahan. Walaupun antara mereka pemerintahan mereka memiliki perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan mereka masing-masing, namun mempunyai kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

---

<sup>28</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 48.

*“Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”*<sup>30</sup>

Sumber *Fiqih Dusturi* yang keempat adalah hasil ijtihad para ulama, hasil ijtihad ini sangat membantu ketika memahami semangat *Fiqih Dusturi* sekaligus prinsip-prinsipnya. Sumber terakhir dari *Fiqih Dusturi* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis.<sup>31</sup>

Berdasarkan Uraian yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Dusturiah* adalah cabang ilmu yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perundang-undangan negara, serta mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara satu dengan warga negara yang lainnya yang berada pada batas administrasi negara. yang mencakup persoalan imamah, hak dan kewajiban, persoalan bai'at, persoalan *waliyul ahd*, persoalan perwakilan, persoalan *ahl halli wal adqdi*, persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Negara sebagai konstruksi yang dengan sengaja diciptakan oleh umat manusia (*human Reaction*) mengenai pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian diorganisasikan dengan sedemikian rupa untuk tujuan pemenuhan kepentingan dan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>32</sup>

Menurut Al-mawardi lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sebab manusia merupakan makhluk yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya tanpa adanya orang lain dan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 54.

<sup>32</sup> Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 11.

tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya orang lain, sehingga hal mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu. Kelemahan yang ada dalam diri manusia ini kemudian mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk sebuah negara (*a state*).

Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, hak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan diberikan oleh pemimpin negara kepada warga negara, dan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara terhadap negara dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tiap individu wajib untuk melaksanakan kewajiban sebagai konsekuensi mereka sebagai warga negara. Tiap warga negara juga memiliki kedudukan dalam masyarakat serta memiliki hak pribadi yang bersifat asasi seperti: hak hidup, hak memiliki harta, hak memelihara kehormatan, hak kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.<sup>33</sup>

Dalam mengatur negara seorang kepala negara sangatlah penting keberadaannya, karena dia lah yang mengatur, melindungi dan yang menjalankan pemerintahan. Gelar kepemimpinan dalam islam dikenal dengan beberapa sebutan diantaranya, khalifah, imam, dan amir. Menurut Ibn Abi Rabi' memilih dan menetapkan seseorang menjadi kepala negara yang akan mengelola negara, memimpin negara dan mengatasi

---

<sup>33</sup> Imam Jalaludin Rifa'i, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat," *Jurnal Edu Law* Vol. 1 No.1 (2020): 16-17

segala permasalahan yang ada di masyarakat sangat urgen dilakukan.<sup>34</sup>

Pemimpin atau imam dalam islam adalah seorang yang diikuti oleh kaumnya, dan membawa serta membimbing kepada hal-hal kebaikan, walaupun terkadang dipakai untuk seorang pemimpin dalam arti yang tidak baik. Kata imam di dalam Al-Qur'an tidak lebih dari 12 kali disebutkan.<sup>35</sup>

Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 124

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

*“Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia (Q.S Al-Baqarah: 124)”*<sup>36</sup>

Kata imam identik dengan sebuah gelar bagi seorang pemimpin yang paralel dengan khalifah, dalam sejarah pemerintahan islam, adalah imam. Secara istilah imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum yang berkaitan dengan urusan agama dan sekaligus urusan dunia.<sup>37</sup> Imamah menurut Al-Mawardi sebagai “suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”<sup>38</sup>

Menurut Al-Mawardi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan dicalonkan

---

<sup>34</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Politik Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 124.

<sup>35</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 54.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI., 15.

<sup>37</sup> Pulungan, *Fiqh siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 63.

<sup>38</sup> Djazuli., *Fiqh Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 56

sebagai kepala negara (*Ahl Al-Imamah*) yang nantinya akan menjadi kepala negara yang mengemban tugas kenegaraan, diantaranya yaitu :

1. Memiliki sifat adil
2. Memiliki dan paham akan ilmu dan mampu untuk berijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum.
3. Sehat pendengaran, mata dan lisannya, agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya
4. Sehat badannya
5. Memiliki kepandaian dalam hal mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umat
6. Memiliki keberanian dan ketegasan dalam membela rakyat dan menghadapi musuh
7. Berasal dari Keturunan Qraisy<sup>39</sup>

Seorang Imam yang mengemban tugas, mengatur dan membawa rakyat kepada kemaslahatan pun mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Menurut al-mawardi hak dari seorang imam ada dua, diantaranya: hak untuk ditati dan dibantu. Hak-hak imam tersebut sangat erat kaitannya dengan kewajiban rakyat.

Berkaitan dengan hak-hak seorang imam, apabila mempelajari dari sejarah, terdapat hak lain bagi imam yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal, yang digunakan untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut dan hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang imam.

Hak yang ketiga ada pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa setelah 6 bulan dari diangkatnya menjadi khalifah, Abu bakar masih pergi kepasar, dari

---

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Konteporer* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 18

hasil dagangannya itu khalifah Abu Bakar menggunakannya untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Kemudian para sahabat melakukan musyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan semua tugas yang diemban dan berat masih harus berdagang untuk menafkahi keluarganya. Maka dari itu khalifah Abu Bakar diberi gaji 6.000 Dirham setahunnya, dan dalam riwayat lain menyebutkan khalifah Abu Bakar digaji 2000 sampai 2.500 Dirham. Walau bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat terhadap jumlah yang diberikan, dapat ditarik kesimpulan jika pada masa itu kaum muslimimin telah meletakkan satu prinsip yaitu prinsip penggajian (memberi gaji) kepada seorang khalifah.<sup>40</sup>

Disamping hak dari seorang imam, terdapat tugas yang diemban oleh seorang imam, tugas-tugas tersebut diantaranya:

1. Melindungi keutuhan agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang Establish dan Ijma' gerakan salaf. Melindungi ummat dari segala bentuk kesesatan, apabila terjadi hal yang demikian maka tugasnya adalah memberikan menjelaskan, menerangkan kepada yang benar, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak nya dan hukum yang berlaku. Sehingga agama akan tetap terlindungi dari segala kemungkinan penyimpangan yang akan terjadi.
2. Menerapkan hukum dan melakukan usaha untuk meredam segala bentuk perseteruan yang teradi diantara dua pihak yang berselisih atau berperkara, sehingga keadilan dapat terwujud secara nyata dan merata, sehingga tidak adanya tindakan yang sewenag-wenang maupun orang lemah yang merasa teraniyaya.

---

<sup>40</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasa Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 60.



3. Berupaya dalam Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, sehingga manusia dapat bekerja dengan leluasa dan mereka merasa aman ketika bepergian ke tempat manapun sehingga tidak mengkhawatirkan keselamatan jiwa dan raga mereka.
4. Menegakkan supremasi hukum (hudud) yang bertujuan untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta'ala dari segala upaya pelanggaran yang terjadi dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
5. Berupaya Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang amat tangguh sehingga musuh tidak mendapatkan kesempatan untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan atau menumpahkan darah orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim.
6. Memerangi atau menindak orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia mengikrarkan diri memeluk islam atau masuk Islam, perlindungan kaum muslimin (ahl al-Dhimmah) sehingga hak Allah Ta'ala terwujud nyata.
7. Mengambil fai' (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan bersedekah sesuai dengan yang telah diwajibkan oleh shari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa adanya rasa takut dan paksa.
8. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara) secukupnya tanpa berlebih-lebihan, dan mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat apalagi menunda pengeluarannya.
9. Memilih dan melakukan pengangkatan terhadap orang-orang yang terlatih dalam bidangnya untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur

guna mengurus masalah keuangan sehingga tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dan bagian keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.

10. Terjun langsung dalam menangani segala persoalan yang ada dan melakukan tinjauan terhadap keadaan di masyarakat.

Seorang imam atau khalifah tidak boleh mengutus atau mewakilkan tugas-tugasnya kepada orang lain walaupun dengan alasan sibuk, istirahat atau ibadah. Jika hal itu terjadi, maka ia berkhianat kepada ummat dan menipu penasihat.<sup>41</sup>

Seorang imam harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dan melaksanakan kewajibannya. Dalam sebuah hadis telah dijelaskan bahwa seorang imam atau khalifah memiliki keharusan untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya

وَعَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ). (متفق عليه)

*“Dari Ibnu Umar r.a berkata, “Aku mendengar Rosulullah رضي الله عنه bersabda, setiap kalian adalah pemimpin maka ia akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya. Maka seorang imam adalah pemimpin rakyatnya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-*

---

<sup>41</sup> Moch. Yunus, “Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan imam (khalifah)”. *Jurnal Keislaman*, Vol. 6 no. 2 (2020): 13-14 <https://doi.org/10.36835/humanistika.v6i1.319>

*laki adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya tentang mereka. Seorang istri adalah pemimpin yang mengurus rumah suaminya dan anaknya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya tentang mereka. Seorang hamba sahaya adalah penanggung jawab harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya tentang itu. Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya”.*(*Muttafaqun ‘alaihi. HR. Al-Bukhari: 2558 dan Muslim: 1829*)<sup>42</sup>

*Ahl al-hall wa al-‘aqd* diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.” Istilah tersebut merupakan hasil rumusan ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang memang bertindak sebagai wakil umat untuk menyalurkan dan menyuarakan hati nurani mereka. Tugas dari seorang *Ahl al-hall wa al-‘aqd* adalah memilih khaifah, imam, dan kepala negara secara langsung.<sup>43</sup>

Menurut *Al-wardi* *Ahl al-hall wa al-‘aqd* juga disebut sebagai *ahl al-ikhtiar* (golongan yang berhak memilih). *Ahl al-hall wa al-‘aqd* berperan sebagai sangat penting dalam memilih seorang diantara *ahl al-imamah* (golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah).<sup>44</sup>

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al-‘aqd* dengan kata *Ulil Amri* sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur’an yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59

---

<sup>42</sup> Imam An-nawawi, *Riyadhus Shalihin*, terjemahan Arif Rahman Hakim (Jawa Tengah:Insan Kamil, 2011), h.360

<sup>43</sup> Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 71.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 72.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rosul (Mhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan diantara kamu (QS. An-Nisa: 59)<sup>45</sup>

Mengenai pernyataannya tersebut Muhammad Abduh menafsirkan jika *Ulil Amri* atau *Ahl al-hall wa al-‘aqd* sebagai kumpulan orang yang terdiri atas berbagai profesi maupun keahlian yang ada dan dapat ditemui dalam masyarakat. Muhammad Abduh pun menyatakan yang dimaksud dengan *Ulil Amri* adalah ”Golongan *Ahl al-hall wa al-‘aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama , para militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan umat dalam masalah kebuuhan dan kemaslahatan publik.”<sup>46</sup>

Adapun syarat bagi seseorang yang menjadi bagian dari *Ahl al-hall wa al-‘aqd* yaitu:

1. *Ahl al-hall wa al-‘aqd* harus mempunyai akhlak yang baik, bersikap jujur, amanah, adil dan mampu menegakan keadilan serta dipercaya oleh masyarakat
2. Berilmu dan paham terhadap bidang politik dan kenegaraan serta paham akan kepemimpinan sehingga persoalan yang berhubungan dengan ketata negaraan dapat teratasi.
3. Lebih dekat dengan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat serta memahami tentang politik.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa sanya *Ahl al-hall wa al-‘aqd* adalah sebuah lembaga

<sup>45</sup> Departemen Agama RI., 69.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 73.

perwakilan rakyat yang menampung, dan menyalurkan aspirasi rakyat yang terdiri dari berbagai kalangan dan propesi . Praktek dari lembaga ini (*Ahl al-hall wa al-'aqd*) adalah ketika pada masa sayyidina Umar, pada saat itu terjadi pengangkatan enam orang sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak dan pantas untuk dijadikan khalifah setelah beliau. Pada saat itu *Ahl al-hall wa al-'aqd* memang belum berdiri sebagai sebuah lembaga namun jika dilihat dari prakteknya pada masa itu sudah menunjukkan bahwa para sahabat telah menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yang telah menjalankan tugasnya dengan baik yaitu dengan menentukan arah kebijakan negara dan pemerintah.<sup>47</sup>

Berkenaan dengan *Ahl al-ikhtiar* Al-mawardi menyebutkan *ahl al-ikhtiar* harus memenuhi 3 persyaratan diantaranya yaitu : *Pertama*; kredibilitas yang ada dalam dirinya atau keseimbangan (*al- 'adalah*) memenuhi kriteria yang ada. *Kedua*; memiliki ilmu sehingga dapat mengetahui siapa yang pantas dan berhak untuk mengemban jabatan dan menjalankan tugas sebagai kepala negara dengan syarat-syaratnya. *Ketiga*; mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah dan hal tersebut menjadi faktor pendorong untuk dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk menjadi kepala negara dan pemimpin umat sehingga terjadinya maslahat diantara umat.<sup>48</sup>

Terdapat kaidah dalam Fiqih siyasah yaitu kaidah *hukm al-hakim ilzamun wa yarfa'u al-khilaf*. Berkaitan dengan kaidah ini yang dimaksud dengan hakim disini ialah *waliy al-amri* atau bisa disebut dengan *uli al-amri al-*

---

<sup>47</sup> Syaiful Hidayat "Tata Negara Dalam perspektif *FIQIH siyasah*". *Jurnal penelitian dan kajian keislaman*, Vol. 1 No. 2 (2013), 8.

<sup>48</sup> Rashda Diana, "Al-Mawardi dan konsep kenegaraan dalam islam," *Tsaqafah* Vol. 13 No. 1 (Mei 2017): 13 <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>

*dunyawi*, ialah pemerintah atau penguasa dengan aparatnya dimulai dari tingkat yang paling rendah seperti RT/RW (presiden, raja, perdana menteri).

Berlandaskan Q.S. Al-Nisa (4):59, maka semua peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah wajib untuk dipatuhi selama tidak bertentangan dengan agama. Dan umat islam tidak wajib patuh apabila pendapat atau keputusan pemerintah tersebut mendatangkan kepada jalan kemaksiatan atau kekufuran.<sup>49</sup>

Ikhwal tugas kenegaraan serta pemerintahannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan diharuskan merumuskan, membuat dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk serta tingkatannya. Hukum maupun peraturan dan lainnya dipandang sebagai hukum islam atau dipandang sebagai hukum yang islami, yang memiliki sifat yang mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi beberapa hal berikut:

1. Ditetapkan Berasaskan Musyawarah (Wa Syawirhum Bi Al-Amri)
2. Tidak Memperberat Atau Mempersulit (Nafi Al-Haraj)
3. Menutup Akibat Negatif (Sadd Al Dzari'ah)
4. Mewujudkan Kemaslahatan Umum (Jalb Al-Mashalih Al-Ammah)
5. Menciptakan Keadilan (Tahqiq Al-Adalah)
6. Tidak Bertentangan Dengan Jiwa Dan Nash Qati'i<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqih Siyasah Moderen," Al-Adalah Vol Xii, No.1 (Juni 2014): 10

<sup>50</sup> Ibid., 14

## **B. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim**

Majelis taklim adalah sebuah lembaga pendidikan atau kelompok masyarakat yang secara nyata mengadakan pendidikan keagamaan Islam yang bersifat nonformal sebagai sarana dakwah Islam. Tugas dari Majelis taklim adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan maupun pengamalan terhadap ajaran agama islam.

Tujuan dari majelis taklim itu sendiri adalah guna :

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Qur'an
2. Membebentuk manusia yang beriman, bertakwa dan memiliki *akhhlakul karimah*.
3. Sebagai sarana untuk membentuk manusia yang berpengetahuan agama secara mendalam.
4. Dapat mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan humanis.
5. Mengokokhkan nasionalisme, kesatuan maupun ketahanan bangsa

Dalam peraturan Menteri Agama republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 dijelaskan bahwa baik perseorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, masjid, dan mushola dapat mendirikan sebuah majelis taklim. Namun dalam mendirikan mejelis taklim tersebut, pada pasal 6 peraturan menteri agama republik indonesia nomor 29 tahun 2019 mempertegas:

1. Setiap majelis taklim yang berdiri harus terdaftar ada Kantor Kementrian Agama
2. Pendaftaran Majelis Taklim sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis oleh pengurus kepada kepala Kantor Kementrian Agama atau dapat melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Pendaftaran majelis taklim sebagaimana yang telah dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi beberapa persyaratan :
  - a. Memiliki kepengurusan
  - b. Memiliki domisili
  - c. Memiliki paling sedikit 15 orang jama'ah
4. Permohonan yang dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan:
  - a. Foto kopi kartu tanda penduduk
  - b. Struktur pengurus
  - c. Surat kerangan domisili majelis taklim dari desa/kelurahan
  - d. Foto kopi kartu tanda penduduk jama'ah.

Penyelenggaraan majelis taklim terdiri atas pengurus, ustadz/stadzah, jama'ah, tempat dan materi. Diantara unsur-unsur penyelenggaraan majelis taklim tersebut, antara yang satu dengan yang lainnya saling bertautan. Tidak akan berjalan apabila salah satu nya tidak ada dan akan terlihat rancu. Pengurus dan jama'ah majelis taklim memiliki kedudukan tersendiri dan khusus.<sup>51</sup>

Pengurus dipilih dan ditetapkan oleh jama'ah setelah diadakannya musyawarah yang bersifat khusus dengan masa bakti kepengurusan ditetapkan dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada majelis taklim. Struktur kepengurusan pada majelis taklim paling sedikitnya terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekertaris
3. Bendahara

---

<sup>51</sup> Tutty Alawiyah, *Manajemen Majelis Taklim Petunjuk Praktis Pengelolaan dan pembentukannya* (Jakarta: Pustaka Intermassa, 2009), 15



Setiap majelis taklim yang ada dibimbing dan dibina oleh para ustadz atau ustadzah. Ustadz atau ustadzah dapat berasal dari ulama, kyai, tuan guru, buya, ajengan, tengk, cendikiawan muslim, penyuluh agama Islam dan atau sebutan lain bagi orang yang paham akan agama Islam. Seorang ustad dan ustadzah adalah sebagai pembimbing dan pembina dari maelis taklim harus mampu membaca Alqur'an dan memahami Al-Qur'an Serta Al-Hadist dengan baik dan benar.

Majelis taklim boleh diikuti, dan berasal dari berbagai jenang usia, pendidikan, ekonomi, tingkatan lainnya. Majelis taklim boleh diikuti oleh siapa saja Tanpa adanya pembeda diantara para jama'ah. Jema'aah majelis taklim terdiri dari jama'ah tetap dan tidak tetap. Maksud dari Jama'ah tetap adalah jama'ah yang terdaftar pada majelis taklim yang berkaitan. Kegiatan-kegiatan majelis taklim dapat dilaksanakan di masjid, mushola, ataupun tempat lain yang memadai.

Materi yang disampaikan kepada para Jama'ah dapat berupa :

1. Materi ajar yang disampaikan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist
2. Selain Al-Qur'an dan Hadist materi ajar dapat berasal dari kiab karya ulama
3. Materi ajar dapat berupa Aqidah, Syari'ah, dan Akhlaq
4. Penyampaian materi ajar diutamakan menggunakan kitab atau buku pegangan sebagai rujukan
5. Selain menggunakan kitab dan buku pegangan para ustadz/ustadzah dapat menggunakan diktat, modul, ataupun buku pedoman.

Dalam menyampaikan materi ajar seorang ustad/ustadzah dapat menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan kondisi jama'ah, yaitu :

1. Ceramah

2. Tanya jawab
3. Praktik
4. Diskusi

Majelis taklim yang berdiri dan sudah terdaftar maka akan diberikan pendanaan dan pembinaan, pendanaan penyelenggaraan majelis taklim dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, serta sumber daerah yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pembinaan terhadap Majelis Taklim pelaksanaannya dilakukan oleh :

1. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
3. Kepala Kantor Kementerian Agama

Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim menjelaskan :

1. Majelis taklim melaporkan kegiatannya kepada kepala kantor Kementerian Agama atau dapat melalui kepala kantor KA kecamatan setiap akhir tahun paling lambat 10 Januari tahun berikutnya
2. Kepala KUA Kecamatan kemudian menyampaikan laporan kegiatan dari majelis taklim kepada Kantor Kementerian Agama
3. Laporan Majelis Taklim paling sedikit dapat berupa:
  - a. Pendahuluan
  - b. Bentuk, tempat, dan waktu kegiatan
  - c. Rencana tindak lanjut<sup>52</sup>

### **C. Pengertian Majelis Taklim**

---

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim, Pasal 4-20

Majelis Taklim secara bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu *majelis* dan *taklim*. Kata majelis ini berasal dari kata *Jalasa*, *Yajlisu*, *Julusan*, yang bermakna duduk atau rapat. Adapun arti lain yang dikaitkan dengan kata yang berbeda seperti *Majelis Wal Majlimah* yaitu tempat duduk, tempat sidang, dewan atau majelis asykar, yang artinya mahkamah militer.

Kata taklim berasal dari kata *‘alima*. *Ya’lamu*, dan memiliki arti mengetahui sesuatu, ilmu, ilmu pengetahuan. Arti taklim itu sendiri adalah hal mengajar, melatih. Maka majelis taklim dapat diartikan sebagai tempat mengajar, tempat mendidik, tempat melatih atau tempat belajar, tempat berlatih atau tempat menuntut ilmu.<sup>53</sup>

Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia erat kaitannya dengan dakwah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam mengadakan sebuah kegiatan berupa kajian dan pengajian di rumah Arqam bin Abil Arqam (*Baitul Arqam*). Kajian dan pengajian ini dilakukan secara sembunyi-bersembunyi ketika beliau masih berada di mekah.<sup>54</sup>

Sedangkan secara istilah, majelis taklim memiliki beberapa pengertian, diantaranya pendapat dari Effendy Zarkasyi yang menyatakan “*Majelis Taklim bagian dari model dakwah dewasa ini dan sebagai forum belajar untuk mencapai suatu tingkat pengetahuan agama*”. Pendapat yang selanjutnya dikemukakan oleh Syamsudin Abbas, beliau berpendapat bahwa “*Lembaga pendidikan non-formal islam yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh Jama’ah yang relatif banyak*”<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Alawiyah, *Manajemen Majelis Taklim Petunjuk Praktis Pengelolaan dan pembentukannya*, 1

<sup>54</sup> *Ibid.*, 3

<sup>55</sup> *Ibid.*, 2

Majelis taklim merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat nonformal yang keberadaannya diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pada pasal 26 ayat 4 *“Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan Majelis Taklim serta satuan pendidikan yang sejenisnya.”*<sup>56</sup>

Pasal 1 ayat 1 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim, telah dipaparkan Jika yang dimaksud dengan majelis taklim adalah *“Lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam nonformal sebagai sarana dakwah islam”*<sup>57</sup>

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan, Majelis taklim adalah sebuah lembaga atau kelompok masyarakat yang mengadakan kegiatan pendidikan keagamaan islam yang sifatnya nonformal yang dijadikan sebagai pendidikan dan sarana dakwah islam.

Dalam struktur departemen agama keberadaan majelis taklim sendiri menjadi salah satu tugas pokok dari pelayanan direktorat pendidikan Diniyah Pondok Pesantren dan majelis taklim ini berada dibawah bimbingan pendidikan Al-Qur'an dan Majelis Taklim.

Beberapa fungsi dari Majelis Taklim adalah:

1. Fungsi keagamaan; yaitu membina serta mengembangkan ajaran Islam sehingga terbentuknya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala.
2. Fungsi pendidikan; yaitu majelis taklim dijadikan sebagai kegiatan pusat belajar mengajar masyarakat,

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 26 Ayat 4

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim, Pasal 1 Ayat 1

atau bisa disebut dengan *Learning Society*, keterampilan hidup dan kewirausahaan.

3. Fungsi sosial; yakni majelis taklim dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi antar sesama saudara muslim, menyampaikan pendapat serta sebagai sarana dialog antar ulama, umara dan umat
4. Fungsi ekonomi; majelis taklim dapat dijadikan sebagai saran pembinaan dan pemberdayaan ekonomi jama'ah
5. Fungsi seni dan budaya.
6. Fungsi ketahanan bangsa; yaitu majelis taklim selain dapat digunakan sebagai media dalam pencerahan umat, majelis taklim pun dapat dijadikan sebagai wahana pencerahan bermasyarakat dan bernegara dengan nilai-nilai islami dan penuh dengan perdamaian dan kerukunan.

Sebuah Majelis Taklim dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan apabila memenuhi beberapa unsur, diantaranya:

1. Terdapat pengelola atau seseorang yang bertanggung jawab yang bersifat tepat berkesinambungan.
2. Memiliki tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ta'lim
3. Terdapat ustadz/ustadzah yang memebrikan pembelajaran secara rutin
4. Terdapat jama'ah yang mengikuti pembelajaran di najelis taklim
5. Kurikulum atau bahan ajar berupa kitab atau buku pedoman dalam pembelajaran
6. Kegiatan dilaksanakan secarateratur dan berkala<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Helmawati, *Pendidikan Nasional Dan Optimalisasi Majelis Ta'lim*, 92

Jika dilihat dari aspek pengikat dari majelis taklim, maka majelis taklim dapat dibedakan menjadi empat jenis diantaranya yaitu:

1. Majelis taklim yang dikelola oleh mushalla, masjid, maupun pesantren tertentu
2. Majelis taklim yang pengelolaannya di dilakukan oleh Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT)
3. Majelis taklim yang dikelola oleh pihak instansi yang jama'ahnya terdiri dari para pegawai atau karyawan
4. Majelis taklim yang pengelolaannya di pegang oleh organisasi tertentu.

Namun jika dilihat dari metode penyajiannya Majelis Taklim dapat dibedakan menjadi empat jenis, diantaranya:

1. Majelis taklim yang metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah
2. Majelis taklim yang menggunakan metode pengelolaan halaqoh
3. Majelis taklim yang dikelola dengan menggunakan metode mudzarah, yaitu metode yang dilaksanakan dengan cara tukar pendapat atau berdiskusi
4. Majelis taklim yang dikelola dengan menggunakan metode campuran, artinya dalam metode ini majelis taklim tidak hanya menggunakan satu metode saja melainkan menggunakan berbagai metode dalam penyampaian materi secara berselang seling.<sup>59</sup>

Majelis Taklim tidak hanya sekedar dijadikan sebagai tempat keagamaan atau aktifitas yang berhubungan dengan keagamaan yang lebih mengutamakan hal-hal yang ritualistik, namun secara lebih jauh majelis taklim adalah tempat, wadah atau sarana dalam memperbaiki diri yang mengajarkan nilai-nilai yang islami sebagai proses dari

---

<sup>59</sup> Ibid., 94

pendidikan.<sup>60</sup> Kegiatan utama dari majelis taklim adalah ceramah tentang keagamaan, dan ada kalanya kajian kitab. Majelis taklim memiliki kedudukan yang sangat penting dimasyarakat, yaitu berkedudukan sebagai alat atau media yang digunakan dalam membina kesadaran beragama di tengah masyarakat.<sup>61</sup>

Pelaksanaan kegiatan majelis taklim dapat dilaksanakan dimana saja, dan dapat diikuti oleh siapa saja, tidak adanya perbedaan diantara para jama'ah, baik perbedaan sosial maupun ekonomi. Kegiatan majelis taklim dipandu oleh seorang ustadz/ustadzah yang bertugas untuk membina dan memberikan pengajaran terhadap jama'ah-jama'ahnya. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sebuah majelis taklim biasanya dilengkapi oleh saran dan prasarana sebagai penunjang kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan penyampaian materi yang disampaikan oleh ustad/ustadzah dapat disampaikan secara maksimal.

Keberadaan kepengurusan dalam majelis taklim sangatlah penting. Pengurus adalah orang-orang yang terpilih untuk dapat *handle* segala urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan majelis taklim. Pengurus adalah orang-orang yang terpilih dan telah memenuhi persyaratan tertentu. Kepengurusan dari majelis taklim terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara dan beberapa orang yang ditetapkan menurut bidangnya masing-masing.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Hidayah Quraisy dan Jamaluddin Arifin "Eksistensi Majelis Taklim Asyifah di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar". *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* V. V No. 2 (Mei 2017):5

<sup>61</sup> Nur Aliyah Rifdayuni, "Peran Penyuluh Agama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah" .(Tesis Program Magister Ilmu Dakwah Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung , 2018): 63

<sup>62</sup> Alawiyah, *Mananajemen Majelis Taklim Petunjuk Praktis Pengelolaan dan pembentukannya*, 16





## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku:**

- A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Depdiknas RI. *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Depdiknas, 2003.
- Depdiknas RI. *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) E
- Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementas Kemaslahatan Uma Dalam Rambu-Ramb Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Helmawati, *Pendidikan Nasional Dan Optimalisasi Majelis Ta'lim*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, terjemahan Arif Rahman Hakim (Jawa Tengah:Insan Kamil, 2011.
- Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Jilmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009.
- Khairuddin, Iwan satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

M.Burhan Mungin, Rahma Ida, *Tehnik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta : Pranadamedia Grup, 2020.

Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Konteporer*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), h.18 Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada media Group, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muhammad, Abdul kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) Cet ke-1

Muzar Ibn Syarif, Khamami zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga

Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Rifdayuni, Nur Aliyah Rifdayuni, “*Peran Penyuluh Agama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah*” .(Tesis Program Magister Ilmu Dakwah Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung , 2018.

Sayuti Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantiaf dan Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2019.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung; Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Tutty Alawiyah, *Manajemen Majelis Taklim Petunjuk Praktis Pengelolaan dan pembentukannya*, Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Zaidan, Abdul Karim, *Hak dan kewajiban warga negara menurut syare'at islam*, Jakarta: Pustaka Amani Jakarta.

### **Wawancara:**

Ahmad Ta'yin, "Penyuluh Agama Islam non PNS kecamatan Pugung" *Interview/ Wawancara*, 19 Maret 2021.

Fatimah, "Ketua Majelis Taklim At-taqwa" *Interview/ Wawancara*, 22 Juli 2021.

Hardasyah, "Camat Pugung" *Interview/ Wawancara*, 12 Maret 2021.

Hartati, "Ketua Majelis Taklim Baitul Muslimin" *Interview/ Wawancara*, 6 April 2021.

Maimunah, "Ketua Majelis Taklim At-taqwa" *Interview/ Wawancara*, 22 Juli 2021.

Muhammad Sarwidi, "Ketua Forum Majelis Taklim di Kecamatan Pugung" *Interview/ Wawancara*, 20 Maret 2021.

Murnawati, "Ketua Majelis Taklim Al-Muttaqin" *interview/ wawancara*, 19 Juli 2021

Neli, "Ketua Majelis Taklim Al-hidayah" *Interview/ Wawancara*, 22 Juli 2021.

Saeu Rohman, "Penyuluh Agama Islam non PNS kecamatan Pugung" *Interview/ Wawancara*, 12 Maret 2021.

Soraya,” Ketua Majelis Nurul Iman ” *Interview/ Wawancara*, 19 Maret 2021.

**Jurnal:**

Buhori Muslim, “Analisis terhadap pemikiran John Dewey menurut Perspektif pendidikan Nasional”. *Jurnal SOSIO-RELIGIA*, Vol. 8 no. 4 Agustus 2009.

Hidayah Quraissy , Jamaluddin Arifin “Eksistensi Majelis Taklim Asyifah di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* v, No.2, (2017): 5

Imam Jalaludin Rifa’i, “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat*,” *Jurnal dEdu Law* 1 no.1, (2020)

Moch Yunus, “ *Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan imam (khalifah)*,” *Humanistika: Jurnal Keislaman*, Vol. 6 no. 2 (2020): 13-14  
<https://doi.org/10.36835/humanistika.v6i1.319>

Rashda Diana, *Al-Mawardi dan konsep kenegaraan dalam islam*,” *Tsaqafah* 13, no. 1, (2017): 13,  
<http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>

Suharti, Al-Siyasah A-Syar’iyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politi Islam Ibn Taimiyah) *Al-ijtihad Jurnal Pemikiran Islam*, Vol, No 2, (Jul-Des 2015).

Syaiful Hidayat “*Tata Negara Dalam perspektif Fiqih siyasah*,” *Tafaquh* 1, No. 2, (2013).

Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqih Siyasah Moderen,” *Al-Adalah* Vol Xii, No.1 (2014): 10

Zaini Dahlan, “Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta’lim, Jurnal Pendidikan dan Keislaman”. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. I. No. 1 (2018).

